



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIMIKA JAYA KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas Timika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIMIKA JAYA KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
17. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas Timika.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## BAB III

### TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Bagian Kesatu Tugas Puskesmas Timika Jaya

#### Pasal 3

Puskesmas Timika mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

#### Bagian Kedua Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Timika Jaya , meliputi:
  - a. Upaya Kesehatan Perorangan terdiri atas:
    1. Pelayanan gawat darurat;
    2. Pelayanan rawat jalan;
    3. Pelayanan rawat inap;
    4. Pelayanan PONED;
    5. Pelayanan laboratorium sederhana;

6. Pelayanan farmasi;
  7. Pelayanan gizi;
  8. Pelayanan pasien keluarga miskin;
  9. Pelayanan rekam medik;
  10. Pelayanan pengelolaan limbah;
  11. Pelayanan administrasi dan manajemen;
  12. Pelayanan ambulance
  13. Pelayanan Laundry
  14. Pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  15. Pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
  16. Pelayanan keamanan.
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  4. Pelayanan kesehatan balita;
  5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal dan penetapan target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran;
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.

- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Puskesmas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 4 Juli 2022

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 32

Berita Daerah sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN JENIS PELAYANAN UNTUK  
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS TIMIKA JAYA**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pelayanan Gawat Darurat	3 Setiap pasien dengan kasus gawat darurat mendapatkan pelayanan sesuai standar	4 100%	5 80%	6 80%	7 90%	8 100%	9 100%	10 100%	11 UGD Puskesmas bertugas memberikan pelayanan gawat darurat yaitu pertolongan pertama pada kondisi akut atau menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan pasien seperti kecelakaan lalu lintas, persalian dengan penyulit dan penyakit lain yang mendadak dan gawat dan untuk selanjutnya melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit. Penanganan kegawat daruratan di Puskesmas meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Diagnosis</li><li>- Penanganan permasalahan pada (A) Airway / jalan nafas, (B) Breathing / ventilasi pernafasan, (C) Circulation / Sirkulasi pembuluh darah.</li><li>- Melakukan pertolongan pertama sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit</li></ul> Melakukan <i>resusitasi</i> dasar, penilaian disabilitas, penggunaan obat, dan evakuasi dan rujukan antar Fasilitas



No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan	
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Pelayanan Kesehatan
2	Pelayanan Rawat Jalan	Setiap pasien rawat jalan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan pasien rawat jalan meliputi: - <i>Anamnese</i> , pemeriksaan fisik dan diagnostik - Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium - Pemberian obat
3	Pelayanan Rawat Inap	Setiap pasien rawat inap mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	90%	75%	90%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan pasien rawat inap meliputi : - Melakukan perawatan terhadap tindakan kooperatif terbatas terhadap pasien rawat inap, pasca persalinan. - Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi penderita dalam rangka <i>diagnostic</i> dengan rata-rata 1-3 hari perawatan
4	Pelayanan PONED	Setiap pasien PONED mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergensi</i> Dasar (PONED) meliputi Pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan <i>obstetri dan neonatal</i> yang terjadi pada : - ibu hamil - ibu bersalin maupun - ibu dalam masa nifas dengan komplikasi <i>obstetri</i> yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pelayanan Laboratorium Sederhana	Setiap pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang Laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar	100%	80%	70%	80%	90%	100%	100%	<p>Pelayanan Laboratorium Sederhana di Puskesmas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hematologi : Hemoglobin, Hematokrit, Hitung Eritrosit, Hitung Trombosit, Hitung Jenis</i></li> <li>- <i>Leukosit, Led, Masa Perdarahan, Dan Masa Pembekuan</i></li> <li>- <i>Kimia Klinik : Glukosa, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Sgot, Sgpt, Asam Urat, Ureum, Kreatinin, Trigliserida, Kolesterol Total, dll.</i></li> <li>- <i>Mikrobiologi dan parasitologi : BTA, Diplococcus gramnegatif, Tricomonas Vaginalis, Candida Albicans, Bacterial Vaginosis, Malaria, Microfilaria dan Jamur Permukaan</i></li> <li>- <i>Urinalisa : Macroscopis, pH berat jenis, Protein, glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Nitrit, Leukosit, Eritrosit, dan microscopis (sedimen)</i></li> <li>- <i>Imunologi : Test kehamilan, golongan darah, widal, VDRL, HbsAg, Anti Hbs, Anti HIV, dan Sars Cov-2</i></li> <li>- <i>Tinja : Macroscopis, darah samar dan Microscopis</i></li> </ul>

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pelayanan Farmasi	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan farmasi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80%	80%	85%	90%	100%	100%	Pelayanan Farmasi klinik meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat</li> <li>- Pelayanan Informasi Obat (PIO)</li> <li>- Konseling</li> <li>- <i>Ronde / Visite</i> (khusus pasien rawat inap)</li> <li>- Pemantauan dan pelaporan efek samping obat (ESO)</li> <li>- Pemantauan Terakhir Obat (TO)</li> <li>- Evaluasi penggunaan obat</li> </ul>
7	Pelayanan Gizi	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan Gizi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	70%	70%	75%	80%	100%	100%	Pelayanan Gizi di Puskesmas meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan dalam gedung               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan gizi rawat jalan</li> <li>2. Pelayanan gizi rawat inap</li> </ol> </li> <li>- Pelayanan diluar gedung               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan gizi / edukasi gizi</li> <li>2. Konseling ASI Eksklusif dan PMBA</li> <li>3. Konseling gizi melalui Posbindu PTM</li> <li>4. Pengelolaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu</li> <li>5. Pengelolaan pemberian kapsul vitamin A</li> <li>6. Pengelolaan pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil dan ibu nifas dan remaja puteri.</li> </ol> </li> </ul>

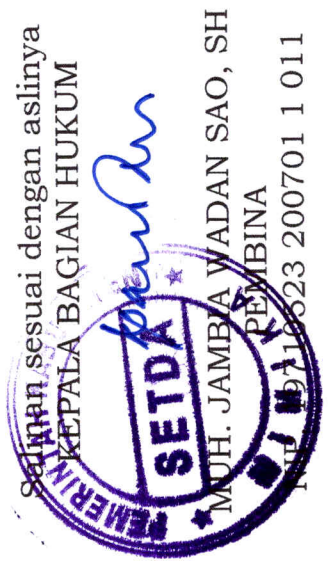
No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										7. Edukasi dalam rangka pencegahan anemia pada remaja puteri dan WUS 8. Pengelolaan pemberian MP-ASI dan PMT pemulihan
8	Pelayanan Pasien Keluarga Miskin	Setiap pasien keluarga miskin yang membutuhkan pelayanan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan pasien dari keluarga miskin meliputi : - Kebijakan Puskesmas untuk pelayanan pasien keluarga miskin - Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin
9	Pelayanan Rekam Medik	Tersedianya pelayanan rekam medik sesuai standar	100%	70%	70%	80%	100%	100%	100%	Pelayanan Rekam Medik di Puskesmas meliputi : - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama baik yang rawat jalan dengan waktu penyediaan dokumen di mulai dari pasien mendaftar sampai dengan rekam medik ditemukan oleh petugas - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama baik yang rawat inap dengan waktu penyediaan dokumen di mulai dari pasien rawat inap untuk menjalani rawat inap oleh dokter sampai rekam medik rawat inap tersedia di bangsal

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan	
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	<p>pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan pengisian rekam medik yang telah di isi oleh dokter dalam waktu kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau identitas pasien, <i>Anamnesa</i>, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume</li> <li>- Kelengkapan <i>informed consent</i> atau persetujuan tindakan medis</li> </ul>
10	Pelayanan Pengelolaan Limbah	Tersedianya pengelolaan limbah yang sesuai standar	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah medis meliputi ruang, mesin, dan perlengkapan, dan peralatan untuk pengelolaan limbah medis seperti limbah air, dan padat
11	Pelayanan Administrasi dan manajemen	Tersedianya petugas yang menduduki jabatan agar administrasi dan manajemen dapat terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Agar administrasi dan manajemen data berjalan sebagaimana mestinya di mana harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya SDM yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tersurat dalam struktur organisasi Puskesmas</li> <li>- Adanya peraturan karyawan Puskesmas yaitu peraturan kerja agar ada kepastian tugas , kewajiban dan hak-hak</li> </ul>

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan	
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	<p>karyawan puskesmas, sehingga tercipta dan terpelihara keserasian hubungan kerja</p> <p>untuk menjamin keseimbangan antara kesejahteraan dan kinerja pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya daftar urut kepengkataan karyawan</li> <li>- Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan</li> <li>- Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat</li> <li>- Ketepatan waktu pengurusan laporan keuangan</li> <li>- Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat jalan dan rawat inap</li> <li>- Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja</li> <li>- Serta ketepatan waktu pemberian insentif</li> </ul>
12	Pelayanan Ambulance	Tersedianya Pelayanan Ambulans 24 Jam di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya pelayanan mobil ambulans yang siap 24 jam dengan tenaga sopir yang terlatih	
13	Pelayanan Laundry	Tersedianya Pelayanan Laundry	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan laundry meliputi : pencucian, penyiapan dan penyediaan linen bersih di	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3 sesuai standar	4	5	6	7	8	9	10	11 Puskesmas baik dilakukan oleh Puskesmas maupun pihak ketiga
14	Pelayanan Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas sesuai dengan standar	100%	80%	75%	80%	100%	100%	100%	Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara kalibrasi atau pengujian kembali terhadap peralatan oleh lembaga kalibrasi yang sah
15	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Terlindungnya pasien, pengunjung dan petugas dari infeksi	100%	NA	75%	80%	100%	100%	100%	Pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas meliputi : - Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) - Penggunaan APD sesuai standar
16	Pelayanan keamanan	Pelayanan Keamanan di Lingkungan Puskesmas sesuai standar	100%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	Tersedianya petugas keamanan yang siap berjaga 24 jam dengan <i>shift</i> yang sudah ditentukan.

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG





**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN JENIS PELAYANAN UNTUK  
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS TIMIKA JAYA**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	1 Tahun	Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T meliputi <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran berat badan</li><li>- Pengukuran tekanan darah</li><li>- Pengukuran lingkar lengan atas (Lila)</li><li>- Pengukuran tinggi puncak rahim ( fundus uteri)</li><li>- Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)</li><li>- Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi</li><li>- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet</li><li>- Tes laboratorium</li><li>- Tatalaksana / penanganan kasus</li><li>- Temu wicara</li></ul>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	1 Tahun	Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi <ul style="list-style-type: none"><li>- Persalinan normal</li><li>- Persalinan komplikasi</li></ul>
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	1 Tahun	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Strandard kwanntitas :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) 6 – 48 jam</li><li>b. Kunjungan Neonatal 2 (KN 2 ) 3 – 7 hari</li><li>c. Kunjungan Neonatal 3 ( KN 3) 8 – 28 hari.</li></ol></li><li>- Standar kualitas :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0 – 6 jam)</li></ol></li></ul>



No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
					<p>Perawatan Neonatal esensial saat lahir meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemotongan dan perawatan tali pusat</li> <li>b. Inisiasi menyusui dini ( IMD )</li> <li>c. Injeksi vitamin K1</li> <li>d. Pemberian salep / tetes mata antibiotic</li> <li>e. Pemberian imunisasi ( injeksi vaksin hepatitis BO )</li> </ol> <p>2. Pelayanan esensial setelah lahir ( 6 jam – 28 hari )</p> <p>Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perawatan bayi baru lahir dan asi eksklusif</li> <li>b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.</li> <li>c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1</li> <li>d. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia &lt;24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan</li> <li>e. Penanganan dan rujukan kasus Neonatal Komplikasi</li> </ol>
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan balita berusia 0 – 59 bulan sesuai standar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan kesehatan balita sehat meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan balita usia 0 – 11 bulan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penimbangan minimal 8 kali setahun</li> <li>b. Pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun</li> <li>c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun</li> <li>d. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 – 11 bulan 1 kali setahun</li> </ol> </li> <li>e. Pemberian imunisasi dasar lengkap</li> </ol> </li> </ul>

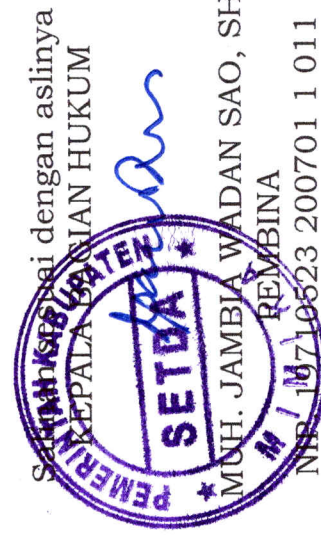
No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
					<p>2. Pelayanan kesehatan balita usia 12 – 23 bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penimbangan minimal 8 kali setahun ( minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan</li> <li>b. Pengukuran panjang /tinggi badan minimal 2 kali /tahun</li> <li>c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun</li> <li>d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun</li> <li>e. Pemberian imunisasi lanjutan</li> </ol> <p>3. Pelayanan kesehatan balita usia 24 – 59 bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan ) pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun</li> <li>b. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / 2 tahun</li> <li>c. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun</li> <li>d. Pemantauan perkembangan balita.</li> <li>e. Pemberian kapsul vitamin A</li> <li>f. Pemberian imunisasi dasar lengkap</li> <li>g. Pemberian imunisasi lanjutan</li> <li>h. Pengukuran berat badan dan panjang / tinggi badan</li> <li>i. Edukasi dan informasi</li> </ol> <p>- Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</p>
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pemerintah daerah	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screening kesehatan. Pelaksanaan screening kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di laksanakan di satuan pendidikan</li> </ol>

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
					<p>dasar (SD/MI dan SMP /MTS) dan diluar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas /LPKA dan lainnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian status gizi</li> <li>b. Penilaian tanda vital</li> <li>c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut</li> <li>d. Penilaian ketajaman indra</li> </ol> <p>2. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan umpan balik hasil screening kesehatan</li> <li>b. Melakukan rujukan jika di perlukan</li> <li>c. Memberikan penyuluhan</li> </ol>
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warganegara usia 15 tahun – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana</li> <li>2. Pelayanan screening faktor risiko pada usia produktif adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran tinggi badan dan lingkar perut</li> <li>b. Pengukuran tekanan darah</li> <li>c. Pemeriksaan gula darah</li> <li>d. Anamnesa perilaku berisiko</li> </ol> </li> <li>3. Tindaklanjut hasil screening kesehatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan rujukan jika diperlukan</li> <li>b. Memberikan penyuluhan kesehatan</li> </ol> </li> </ol>
7	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	1 Tahun	<p>a. Pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat</li> <li>2. Screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular</li> </ol>

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	2	3 lanjut usia sesuai standar	4 4	5 5	6 b. Pelayanan screening faktor risiko pada lanjut usia adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut</li> <li>2. Pengukuran tekanan darah</li> <li>3. Pengukuran gula darah</li> <li>4. Pemeriksaan gangguan mental</li> <li>5. Pemeriksaan gangguan kognitif</li> <li>6. Pemeriksaan tingkat kemandirian lanjut usia</li> <li>7. Anamnesa perilaku berisiko</li> </ol> c. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rujukan jika diperlukan</li> <li>2. Memberikan penyuluhan kesehatan</li> </ol>
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>2. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat</li> <li>3. Melakukan rujukan jika diperlukan</li> </ol>
9	Pelayanan Kesehatan pendarita diabetes melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran gula darah</li> <li>2. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat</li> <li>3. Melakukan rujukan jika diperlukan</li> </ol>

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat (ODGJ) Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesehatan jiwa</li> <li>2. Edukasi pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan status mental</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Edukasi kepatuhan minum obat</li> <li>d. Melakukan rujukan jika di perlukan</li> </ol> </li> </ol>
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Setiap orang terduga tuberculosi (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan klinis</li> <li>2. Pemeriksaan penunjang</li> <li>3. Edukasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan klinis pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda</li> <li>• Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan / atau bakteriologis dan / atau radiologist</li> <li>• Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan</li> <li>• Melakukan rujukan bila diperlukan</li> </ul> </li> </ol>
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukasi Perilaku Berisiko</li> <li>b. Skrining</li> </ol> </li> <li>- Orang dengan Risiko terinfeksi Virus HIV yaitu :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil</li> </ol> </li> </ul>

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	2 Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus = HIV</i> )	3	4	5	6 b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS d. Penjajah seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa. e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali, atau secara teratur apapun orientasi seksnya ( <i>heteroseksual, homoseksual, atau biseksual</i> ) f. Transgender / Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual



BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG